

The logo of the Makassar District Court (Pengadilan Negeri Makassar) is a large, light green circular emblem. It features a central shield with a white star and a red and white cross, surrounded by a yellow sunburst. The shield is set against a background of a yellow chain-link pattern. The text "PENGADILAN NEGERI MAKASSAR" is written in yellow around the top inner edge of the circle, and "DHARMMAYUKTI" is written in yellow along the bottom inner edge. The main title of the report is centered over the logo in bold black text.

**LAPORAN**  
**SURVEI**  
**PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PADA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
**KELAS IA KHUSUS**  
**TRIWULAN II**  
**TAHUN 2024**

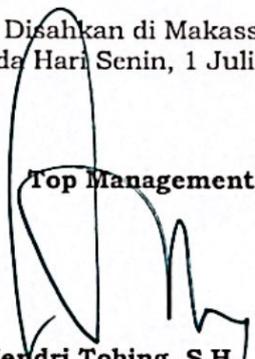
**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS**

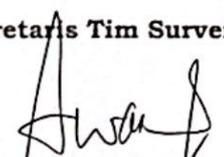
**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Senin, 1 Juli 2024

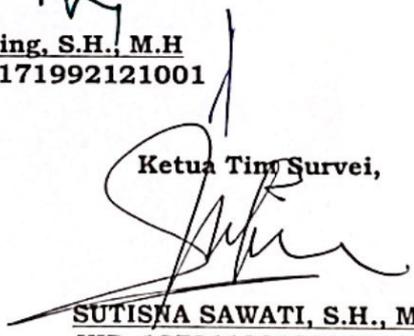
**Top Management,**

  
**Hendri Tobing, S.H., M.H**  
**NIP. 196505171992121001**

**Sekretaris Tim Survei,**

  
**NURIYA AWAD, S.H.**  
**NIP. 197503302000032002**

**Ketua Tim Survei,**

  
**SUTISNA SAWATI, S.H., M.H**  
**NIP. 197311231999031007**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                       | <b>2</b>                            |
| <b>BAB I</b> .....   | <b>4</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | <b>4</b>                            |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 4                                   |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan .....   | 5                                   |
| 1.3. Landasan Hukum.....   | 5                                   |
| 1.4. Rencana Kerja .....   | 6                                   |
| <b>BAB II</b> 7  |                                     |
| <b>METODOLOGI</b> .....  | <b>7</b>                            |
| 2.1. Metode Penelitian .....   | 7                                   |
| 2.2. Populasi Dan Sampel .....                                       | 7                                   |
| 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....                       | 7                                   |
| 2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....               | 8                                   |
| 2.5. Teknik Analisis Data .....                                      | 8                                   |
| 2.6. Tahapan pelaksanaan.....  | 9                                   |
| <b>BAB III</b> 1   |                                     |
| <b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....                            | <b>1</b>                            |
| 3.1. Profil Responden.....   | 1                                   |
| 3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator .....                | 5                                   |
| 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan ..... | 16                                  |
| 3.4. Analisa dan Tindak Lanjut.....                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENUTUP</b> .....   | <b>18</b>                           |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 18                                  |
| 4.2. Rekomendasi .....   | 20                                  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                                       | <b>21</b>                           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28
- b) Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tah
- d) un 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

## 1.4. Rencana Kerja

### 1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

- Penyiapan Bahan

Dengan menyiapkan fasilitas untuk pengambilan survei secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 38 responden

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Waktu pengumpulan dilakukan mulai bulan April dan berakhir pada bulan Juni 2024

### 1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)

- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi kemudian disajikan dalam bentuk Laporan.

### 1.4.3. Metode Survei

Metode Survei dilakukan dengan menggunakan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak **38** sampel diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar

didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi melalui Aplikasi Survey Pelayanan Masyarakat (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau sampel minimal 38 (Tiga Puluh Delapan) responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Tim Survei, untuk mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mendampingi pengisian Aplikasi Survei, meneliti Aplikasi Survei sekaligus memastikan responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan

indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

| No | Ruang lingkup          |
|----|------------------------|
| 1  | Manipulasi Peraturan   |
| 2  | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3  | Menjual Pengaruh       |
| 4  | Transaksi Biaya        |
| 5  | Biaya Tambahan         |
| 6  | Hadiah                 |
| 7  | Transparansi Biaya     |
| 8  | Percaloan              |
| 9  | Perbuatan Curang       |
| 10 | Transaksi Rahasia      |

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPK | Mutu | Kinerja                    |
|----------------|----------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 1              | 1.00 – 2.5996  | 25 – 64.99                  | 1    | Tidak bersih dari korupsi  |
| 2              | 2.60 – 3.064   | 65.00 – 76.60               | 2    | Kurang bersih dari korupsi |
| 3              | 3.0644 – 3.532 | 76.61 – 88.30               | 3    | Cukup bersih dari korupsi  |
| 4              | 3.5324 – 4.00  | 88.31 – 100.00              | 4    | Bersih dari korupsi        |

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### 3.1. Profil Responden

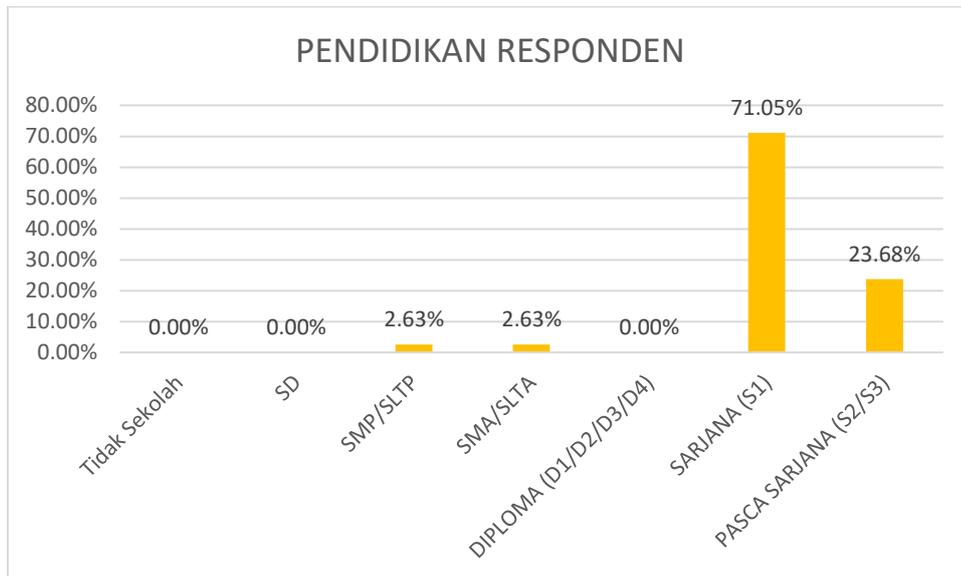
##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas sebanyak **71,05 %** memiliki latar **Sarjana (S1)**.

**Tabel 4.**

**Tingkat pendidikan responden**

| Nomor  | Pendidikan Terakhir      | Frekuensi | %      |
|--------|--------------------------|-----------|--------|
| 1      | Tidak Sekolah            | 0         | 0.00%  |
| 2      | SD                       | 0         | 0.00%  |
| 3      | SMP/SLTP                 | 1         | 2.63%  |
| 4      | SLTA                     | 1         | 2.63%  |
| 5      | Diploma<br>(D1/D2/D3/D4) | 0         | 0.00%  |
| 6      | Sarjana (S1)             | 27        | 71.05% |
| 7      | Pasca Sarjana (S2/S3)    | 9         | 23.68% |
| Jumlah |                          | 38        | 100    |



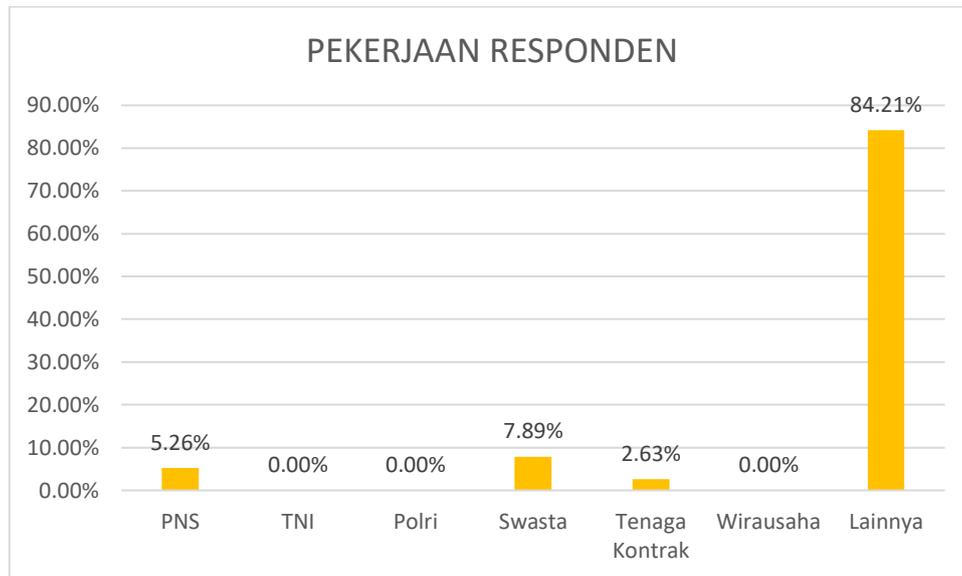
### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **84,21 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki pekerjaan **Lainnya**.

**Tabel 5.**

#### Jenis pekerjaan responden

| Nomor  | Pekerjaan      | Frekuensi | %      |
|--------|----------------|-----------|--------|
| 1      | PNS            | 2         | 5.26%  |
| 2      | TNI            | 0         | 0.00%  |
| 3      | Polri          | 0         | 0.00%  |
| 4      | Swasta         | 3         | 7.89%  |
| 5      | Tenaga Kontrak | 1         | 2.63%  |
| 6      | Wirausaha      | 0         | 0.00%  |
| 7      | Lainnya        | 32        | 84.21% |
| Jumlah |                | 38        | 100    |



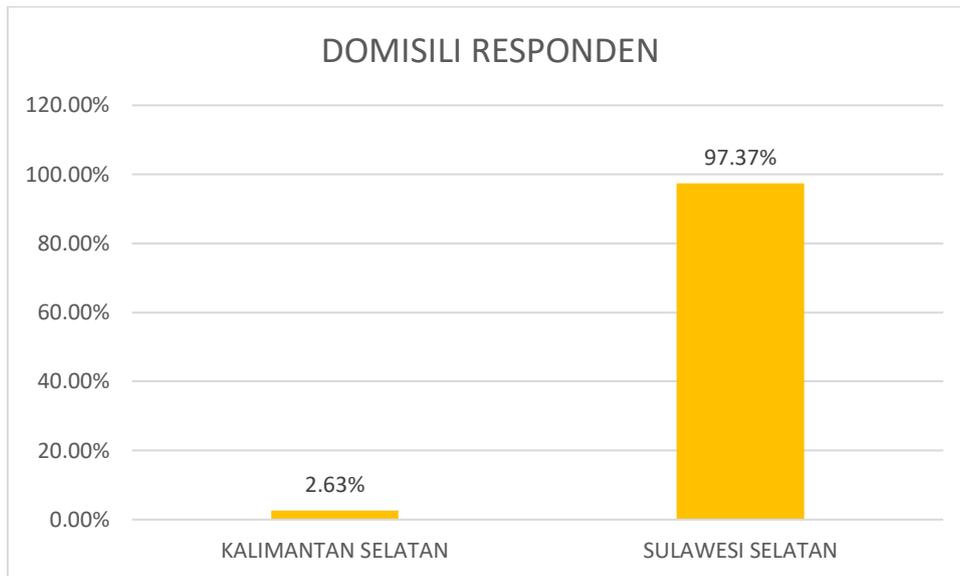
### 3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari **Sulawesi Selatan** dengan persentase **97.37%**.

**Tabel 6**

#### **Domisili Responden**

| No     | Domisili           | Frekuensi | %      |
|--------|--------------------|-----------|--------|
| 1      | Kalimantan Selatan | 1         | 2.63%  |
| 2      | Sulawesi Selatan   | 37        | 97.37% |
| Jumlah |                    | 38        | 100    |

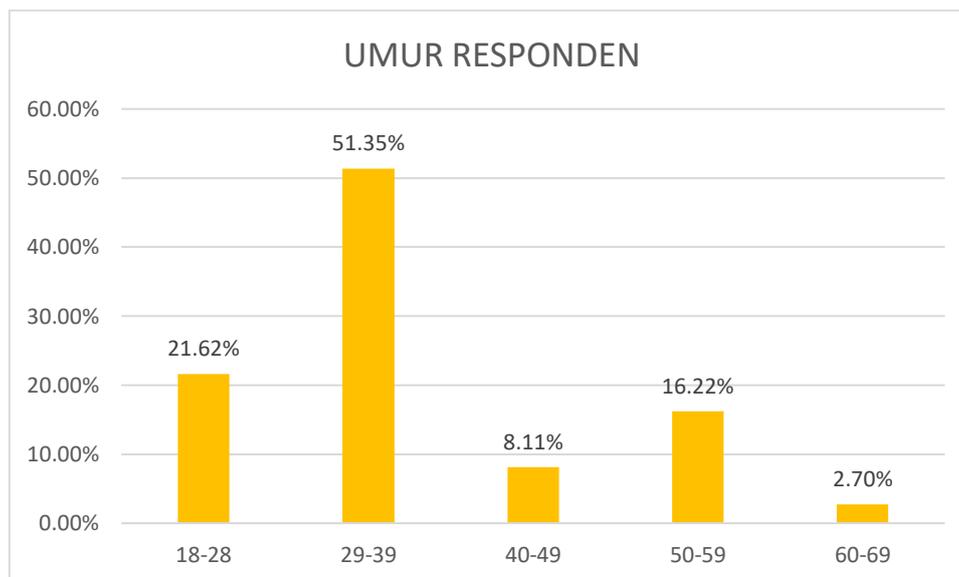


#### **3.1.4. Kelompok usia responden**

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun** sebanyak **51,35 %**. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

**Tabel 7.**  
**Usia responden**

| Nomor  | Umur  | Frekuensi | %      |
|--------|-------|-----------|--------|
| 1      | 18-28 | 8         | 21.62% |
| 2      | 29-39 | 19        | 51.35% |
| 3      | 40-49 | 3         | 8.11%  |
| 4      | 50-59 | 6         | 16.22% |
| 5      | 60-69 | 1         | 2.70%  |
| Jumlah |       | 37        | 100    |



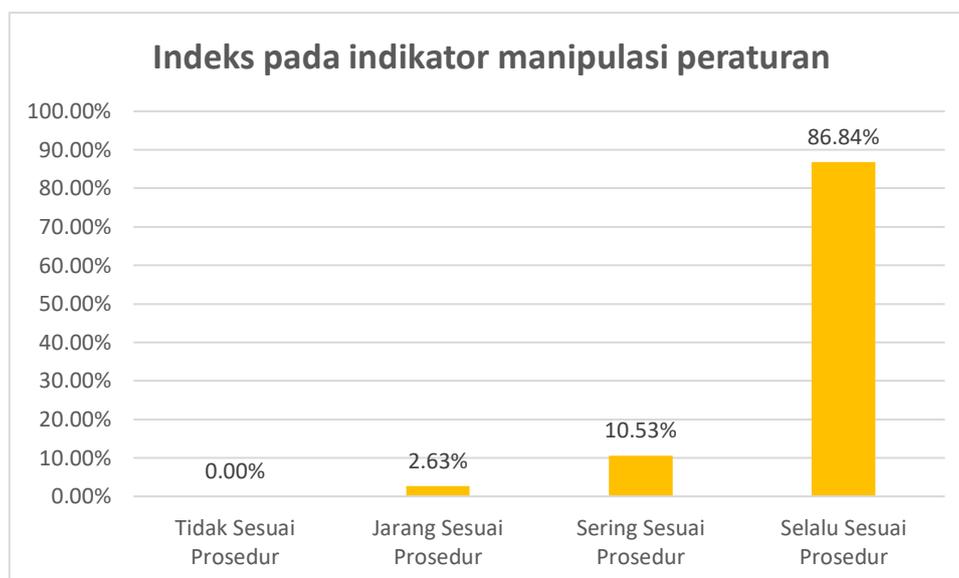
### **3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator**

#### **3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,842** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari persepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

**Tabel 9****Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

| No            | Manipulasi Peraturan   | Frekuensi | %          |
|---------------|------------------------|-----------|------------|
| 1             | Tidak Sesuai Prosedur  | 0         | 0.00%      |
| 2             | Jarang Sesuai Prosedur | 1         | 2.63%      |
| 3             | Sering Sesuai Prosedur | 4         | 10.53%     |
| 4             | Selalu Sesuai Prosedur | 33        | 86.84%     |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>38</b> | <b>100</b> |

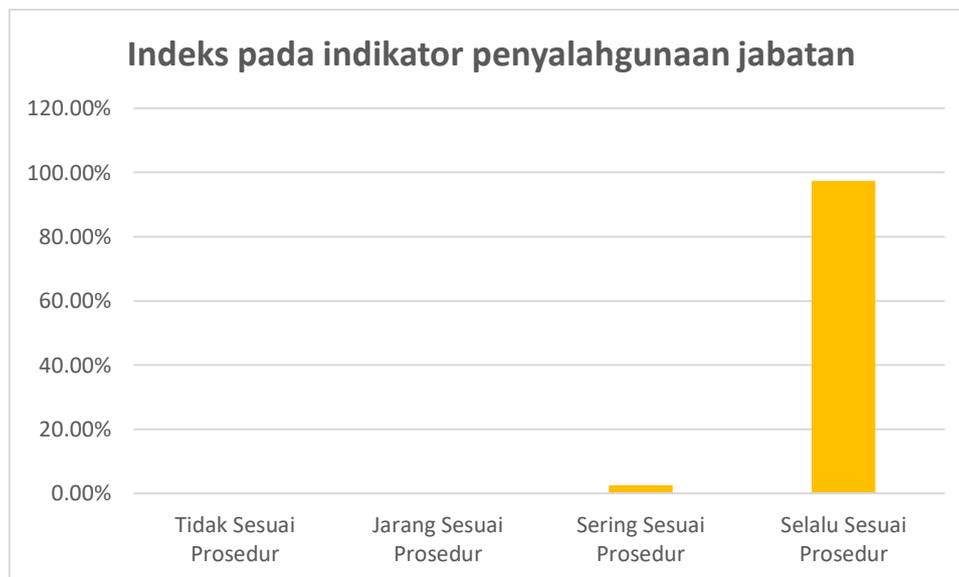
**3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,974**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

**Tabel 10.****Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

| No            | Penyalahgunaan Jabatan                  | Frekuensi | %          |
|---------------|---|-----------|------------|
| 1             | Petugas melayani Selalu Meminta Imbalan | 0         | 0.00%      |
| 2             | Petugas melayani Sering Meminta Imbalan | 0         | 0.00%      |
| 3             | Petugas melayani Jarang Meminta Imbalan | 1         | 2.63%      |
| 4             | Petugas melayani Tanpa Meminta Imbalan  | 37        | 97.37%     |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>38</b> | <b>100</b> |

**3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,921**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

**Tabel 11.****Indeks pada indikator menjual pengaruh**

| No            | Menjual Pengaruh | Frekuensi | %          |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| 1             | Selalu           | 0         | 0.00%      |
| 2             | Sering           | 1         | 2.63%      |
| 3             | Jarang           | 1         | 2.63%      |
| 4             | Tidak ada        | 36        | 94.74%     |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>38</b> | <b>100</b> |

**3.2.4. Indikator Transaksi Biaya**

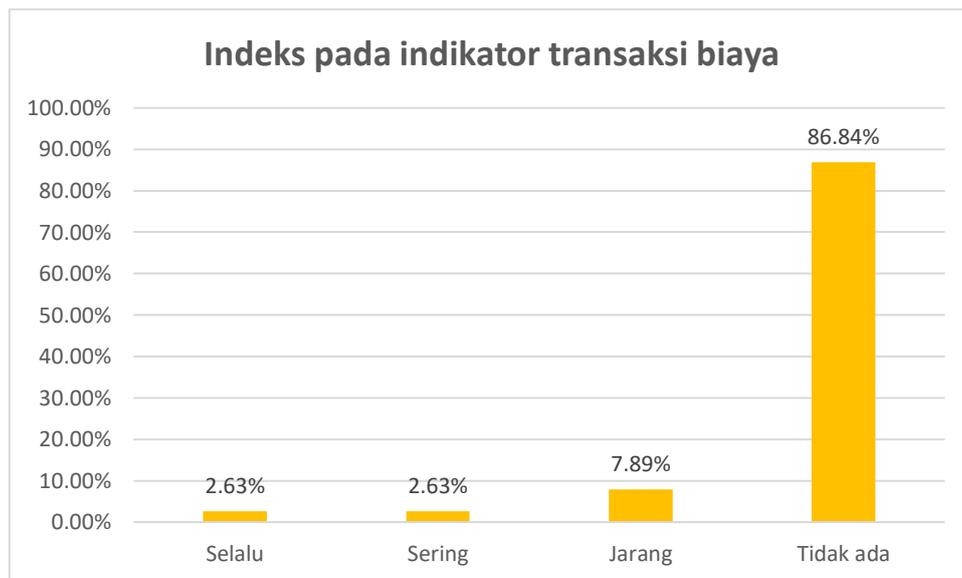
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,789**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan

publik dengan transaksi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner

**Tabel 12. Indeks pada indikator transaksi biaya**

| No            | Transaksi Biaya | Frekuensi | %          |
|---------------|-----------------|-----------|------------|
| 1             | Tidak Pernah    | 1         | 2.63%      |
| 2             | Jarang          | 1         | 2.63%      |
| 3             | Sering          | 3         | 7.89%      |
| 4             | Selalu          | 33        | 86.84%     |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

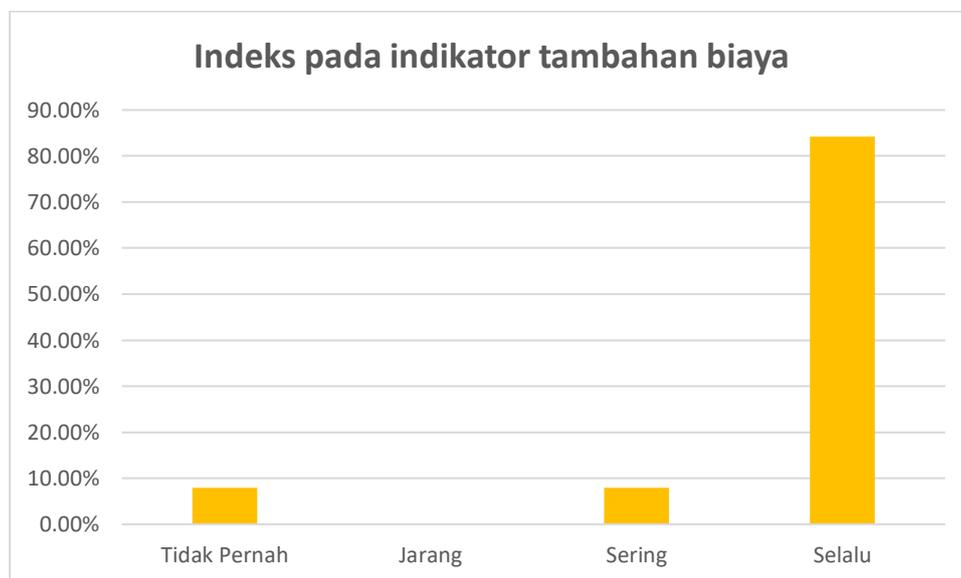
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,684**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

**Tabel 14.**

**Indeks pada indikator tambahan biaya**

| No            | Biaya Tambahan | Frekuensi | %          |
|---------------|----------------|-----------|------------|
| 1             | Tidak Pernah   | 3         | 7.89%      |
| 2             | Jarang         | 0         | 0.00%      |
| 3             | Sering         | 3         | 7.89%      |
| 4             | Selalu         | 32        | 84.21%     |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.6. Indikator Hadiah

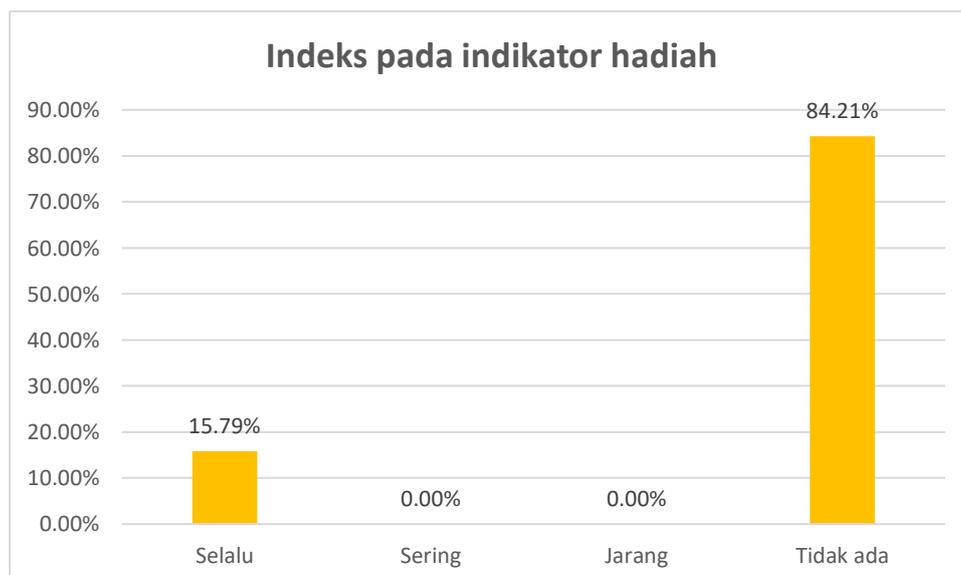
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,526**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apaapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

**Tabel 15.**

**Indeks pada indikator hadiah**

| No            | Hadiah    | Frekuensi | %          |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1             | Selalu    | 6         | 15.79%     |
| 2             | Sering    | 0         | 0.00%      |
| 3             | Jarang    | 0         | 0.00%      |
| 4             | Tidak ada | 32        | 84.21%     |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

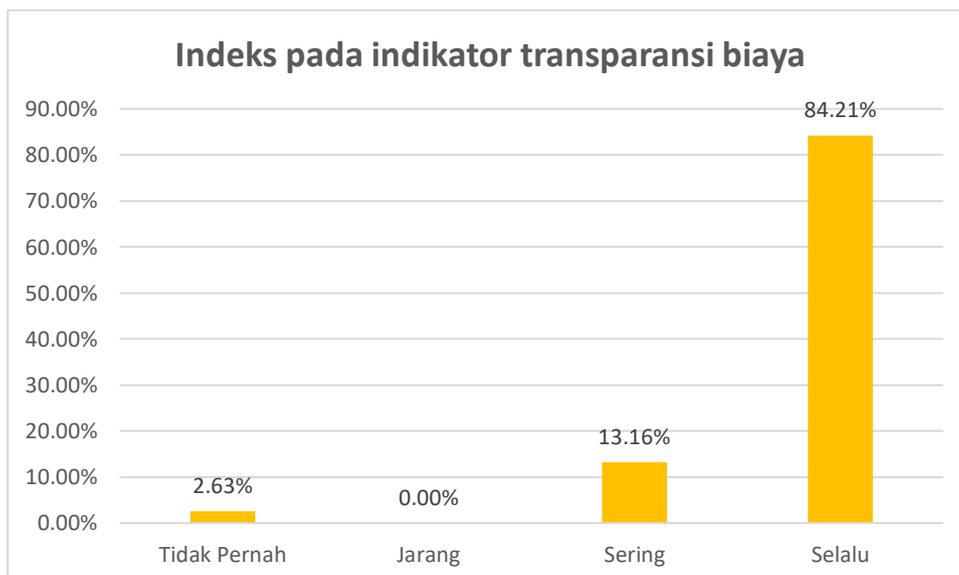
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Trnsnsparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,789**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Transparansi Biaya sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

**Tabel 16.**

#### **Indeks pada indikator transparansi biaya**

| No            | Transparasi Biaya | Frekuensi | %          |
|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 1             | Tidak Pernah      | 1         | 2.63%      |
| 2             | Jarang            | 0         | 0.00%      |
| 3             | Sering            | 5         | 13.16%     |
| 4             | Selalu            | 32        | 84.21%     |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.8. Indikator Percaloan

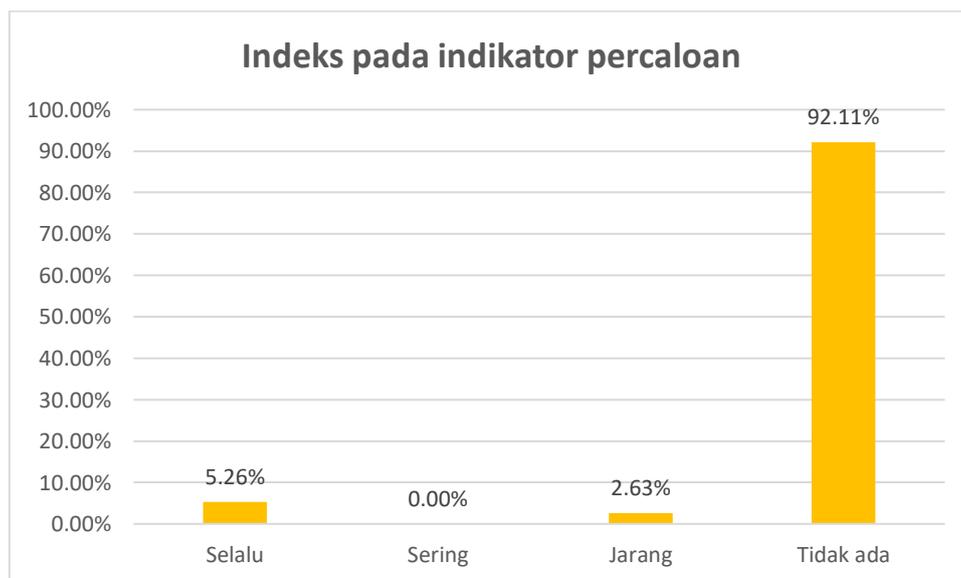
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,816**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengurusan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

**Tabel 17.**

**Indeks pada indikator percaloan**

| No            | Percaloan | Frekuensi | %          |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1             | Selalu    | 2         | 5.26%      |
| 2             | Sering    | 0         | 0.00%      |
| 3             | Jarang    | 1         | 2.63%      |
| 4             | Tidak ada | 35        | 92.11%     |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

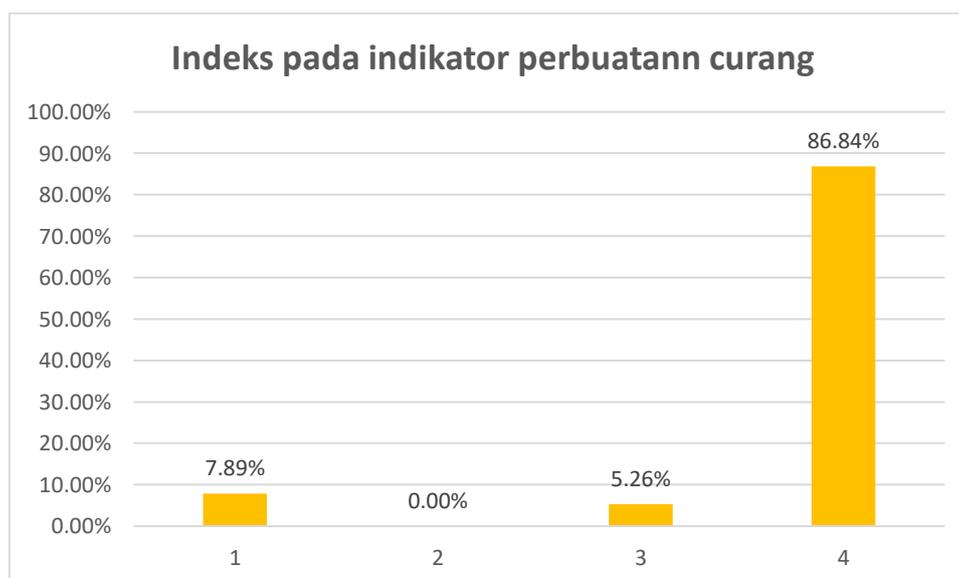
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,711**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari perbuatan curang.

**Tabel 18.**

#### **Indeks pada indikator perbuatan curang**

| No            | Perbuatan Curang | Frekuensi | %          |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| 1             | Selalu           | 3         | 7.89%      |
| 2             | Sering           | 0         | 0.00%      |
| 3             | Jarang           | 2         | 5.26%      |
| 4             | Tidak ada        | 33        | 86.84%     |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

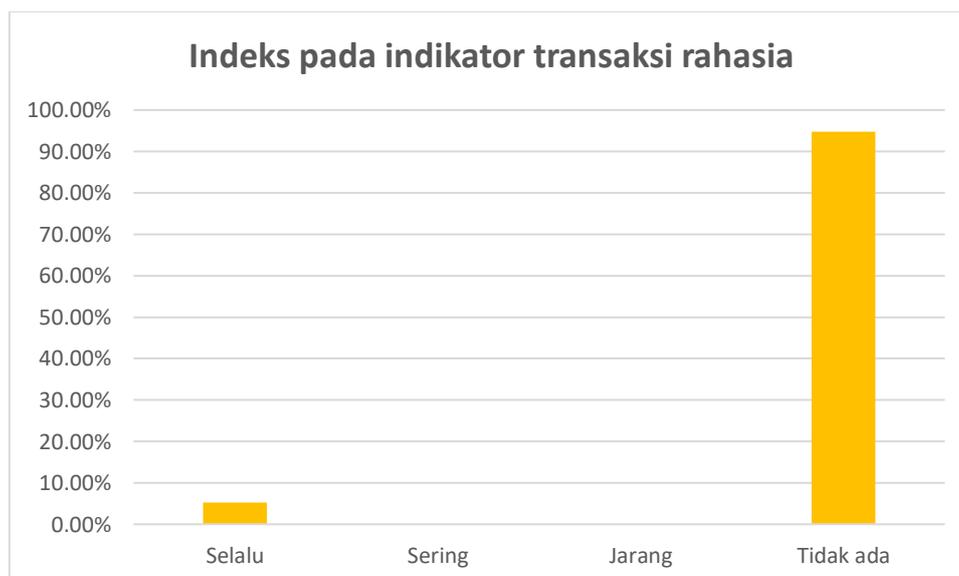
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,842**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan menyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

**Tabel 19.**

**Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia**

| No            | Transaksi Rahasia | Frekuensi | %          |
|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 1             | Selalu            | 2         | 5.26%      |
| 2             | Sering            | 0         | 0.00%      |
| 3             | Jarang            | 0         | 0.00%      |
| 4             | Tidak ada         | 36        | 94.74%     |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>38</b> | <b>100</b> |



### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar **3,79** atau bila dikonversikan adalah sebesar **94,74%**

**Tabel 19.**

#### **Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar**

| <b>No</b> | <b>Unsur Pelayanan</b> | <b>Nilai Rata-rata</b> |
|-----------|------------------------|------------------------|
| U1        | Manipulasi Peraturan   | 3,842                  |
| U2        | Penyalahgunaan Jabatan | 3,974                  |
| U3        | Menjual Pengaruh       | 3,921                  |
| U4        | Transaksi Biaya        | 3,789                  |
| U5        | Biaya Tambahan         | 3,684                  |
| U6        | Hadiah                 | 3,526                  |
| U7        | Transparansi Biaya     | 3,789                  |
| U8        | Percaloan              | 3,816                  |
| U9        | Perbuatan Curang       | 3,711                  |
| U10       | Transaksi Rahasia      | 3,842                  |
|           | Total                  | <b>37,9</b>            |
|           | Rata Rata              | <b>3,79</b>            |

Indeks **3,79** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi

kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,69** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,842**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,974**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,921**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,789**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,684**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,526**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,789**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,816**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,711**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,842**;

**Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2024**

| <b>No.</b> | <b>Ruang Lingkup</b>            | <b>Indeks</b> | <b>Nilai</b> |
|------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1          | Indikator Perbuatan Curang (U9) | 3,711         | 141          |
| 2          | Indikator Biaya Tambahan (U5)   | 3,684         | 140          |
| 3          | Indikator Hadiah (U6)           | 3,526         | 134          |

**Kesan dan Pesan Responden:**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>       | <b>Pekerjaan</b> | <b>Kesan</b>   | <b>Pesan</b>  |
|------------|-------------------|------------------|--|---|
| 1          | Muhdar MS, S.H    | Lainnya          | Pelayanan sudah sangat baik. Untuk pelayanan di PTSP sudah sangat bagus dan semoga ditingkatkan lagi.  | Standar pelayanan 3 S Senyum, Sapa, Salam tetap dimaksimalkan           |
| 2          | Sukardin, S.H.    | Lainnya          | Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar sangat memuaskan pelayanannya dan pegawainya semua ramah dan sopan   | Pelayanan prima yang telah diberikan mohon untuk dipertahankan          |
| 3          | Rahmat, S.H., M.H | Lainnya          | Selaku pengujung Pengadilan Makassar, merasa nyaman baik dari segi pelayanan maupun implementasi tujuan tiap pengunjung. Mudah mudahan kondisi seperti ini tetap berkesinambungan bahkan semakin meningkat | Terus konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat |

#### 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,3 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.**

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

[LOGIN](#)

Beranda / SPAK / Detail

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

**1 Data Responden**  
Nama serta detail responden

**2 Form Kuesioner**  
Isian form kuesioner SPAK

**3 Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

### Data Responden SPAK

|                    |  |                               |   |  |
|--------------------|--|-------------------------------|---|--|
| <b>Nama</b>        | <input type="text" value="boleh inisial atau tidak diisi..."/> | <b>Umur / Jenis Kelamin *</b> | <input type="text" value="tahun"/>            | <input type="text" value="Pilih Jenis Kelamin"/> |
|                    | <small>Minimal 18 Tahun</small>                                |                               |   |  |
| <b>Nomor HP *</b>  | <input type="text" value="462"/>                               | <b>Domisili *</b>             | <input type="text" value="Pilih Wilayah"/>    |  |
|                    | <small>Contoh: 8121111222</small>                              | <b>Pendidikan *</b>           | <input type="text" value="Pilih Pendidikan"/> |  |
| <b>Pekerjaan *</b> | <input type="text" value="Pilih Pekerjaan"/>                   |                               |   |  |

[LOGIN](#)

Beranda SPAK / Detail

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survei Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 **Data Responden**  
Nama serta detail responden

2 **Layanan**  
Layanan

3 **Form Kuesioner**  
Isian form kuesioner SPAK

4 **Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

**Layanan yang Anda dapatkan**

**Jenis Layanan \***

**Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? \***

Pilih Layanan Yang Didapat

Pilih Layanan Yang Didapat

[Kembali](#)

[Selanjutnya](#)

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

LOGIN

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda SPAK / Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden  
Nama serta detil responden

2 Layanan  
Layanan

3 Form Kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur  
 Jarang Sesuai Prosedur  
 Sering Sesuai Prosedur  
 Selalu Sesuai Prosedur

2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Petugas melayani selalu meminta imbalan  
 Petugas melayani sering meminta imbalan  
 Petugas melayani jarang meminta imbalan  
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3 Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu

5 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu

6 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

7 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu

8 Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

9 Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

10 Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

Kembali Selanjutnya

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Form kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesam & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

Statistik Kontak Kami

Baranda Beranda SPAK / Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

4 Data Responden  
Nama serta detail responden

3 Layanan  
Layanan

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.  
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

Simpan Data

Kembali Selanjutnya


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTAMAKASSAR

SULAWESI SELATAN

<http://www.pn-makassar.go.id/>

**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**
**Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024**

 SURVEY PERSEPSI ANTI  
KORUPSI

**NILAI INDEKS**
**3,79 / 94,74%**

|               |                           |                    |
|---------------|---------------------------|--------------------|
| Jumlah        | 38 RESPONDEN              |                    |
| Jenis Kelamin | LAKI-LAKI : 25            | PEREMPUAN : 13     |
| Pendidikan    | Tidak / Belum Sekolah : 0 | Diploma 2 : 0      |
|               | SD : 0                    | Diploma 3 : 0      |
|               | SMP : 1                   | S1 : 27            |
|               | SMU : 1                   | S2 : 9             |
|               | Diploma 1 : 0             | S3 : 0             |
| Pekerjaan     | PNS : 2                   | SWASTA : 3         |
|               | TNI : 0                   | WIRUSAHA : 0       |
|               | POLRI : 0                 | TENAGA KONTRAK : 1 |
|               | LAINNYA : 32              |                    |

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

|   |       |
|---|-------|
| 1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? | 3,526 |
| 2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?                         | 3,684 |
| 3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?                         | 3,711 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

**DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI**

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

2 Juli 2024

Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
 MASYARAKAT  
 UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10           | 10         | 220          | 140        | 1200         | 291        |
| 15           | 14         | 230          | 144        | 1300         | 297        |
| 20           | 19         | 240          | 148        | 1400         | 302        |
| 25           | 24         | 250          | 152        | 1500         | 306        |
| 30           | 28         | 260          | 155        | 1600         | 310        |
| 35           | 32         | 270          | 159        | 1700         | 313        |
| 40           | 36         | 280          | 162        | 1800         | 317        |
| 45           | 40         | 290          | 165        | 1900         | 320        |
| 50           | 44         | 300          | 169        | 2000         | 322        |
| 55           | 48         | 320          | 175        | 2200         | 327        |
| 60           | 52         | 340          | 181        | 2400         | 331        |
| 65           | 56         | 360          | 186        | 2600         | 335        |
| 70           | 59         | 380          | 191        | 2800         | 338        |
| 75           | 63         | 400          | 196        | 3000         | 341        |
| 80           | 66         | 420          | 201        | 3500         | 346        |
| 85           | 70         | 440          | 205        | 4000         | 351        |
| 90           | 73         | 460          | 210        | 4500         | 354        |
| 95           | 76         | 480          | 214        | 5000         | 357        |
| 100          | 80         | 500          | 217        | 6000         | 361        |
| 110          | 86         | 550          | 226        | 7000         | 364        |
| 120          | 92         | 600          | 234        | 8000         | 367        |

-26-

|     |     |      |     |         |     |
|-----|-----|------|-----|---------|-----|
| 130 | 97  | 650  | 242 | 9000    | 368 |
| 140 | 103 | 700  | 248 | 10000   | 370 |
| 150 | 108 | 750  | 254 | 15000   | 375 |
| 160 | 113 | 800  | 260 | 20000   | 377 |
| 170 | 118 | 850  | 265 | 30000   | 379 |
| 180 | 123 | 900  | 269 | 40000   | 380 |
| 190 | 127 | 950  | 274 | 50000   | 381 |
| 200 | 132 | 1000 | 278 | 75000   | 382 |
| 210 | 136 | 1100 | 285 | 1000000 | 384 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR